

Judul : Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR: Cek gudang-gudang adakah penimbunan
Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Rakyat Merdeka : 2

SABTU WAGE
• 12 FEBRUARI 2022
• 11 RAJAB 1443 H
• 10 REJEB 1955

MARTIN MANURUNG

Wakil Ketua Komisi VI DPR

Cek Gudang-gudang Adakah Penimbunan



Cek juga gudang-gudang. Sehingga, tahu betul apakah ada penimbunan atau tidak. Kemendag perlu berinisiatif untuk mengecek. Jangan hanya menunggu laporan.



Seharusnya, berapa harga minyak goreng per liter?

Berdasarkan Permendag 06 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng sawit:

Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter. Minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Tapi di pasaran, harganya bisa lebih mahal dari itu ya...

Nah, makanya kami minta kepada Kementerian Perdagangan di seluruh jajaran eselon 1, 2 dan 3 untuk kembali aktif mengecek pasar. Apakah harga eceran tertinggi itu, terlaksana atau tidak.

Hanya mengecek di pasar?

Cek juga gudang-gudang. Sehingga, tahu betul apakah ada penimbunan atau tidak.

Kemendag perlu berinisiatif untuk mengecek. Jangan hanya menunggu laporan.

Ada kecurigaan, langkanya minyak goreng karena ada yang bermain. Tanggapan Anda?

Nah, karena itu, kami minta Kementerian Perdagangan untuk memantainya.

Aparat hukum juga ya?

Iya, kami minta aparat kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan secara bersama-sama dengan Kemendag.

Pemerintah sudah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. Apakah efektif?

Saya apresiasi untuk operasi pasar. Tetapi, operasi pasar itu sebenarnya hanya satu bagian dari sistem pengendalian harga.

Masalah ini kerap terjadi, kira-kira solusi apa yang Anda usulkan?

Dari sisi non teknis, kita juga mengetahui, khususnya produsen minyak goreng atau perkebunan kelapa sawit. Bahwa, 90 persen produksi CPO (*crude palm oil*) kita itu, untuk komoditi ekspor.

Jadi, kalau produsen minyak goreng yang juga produsen CPO tidak menaati Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan Menteri Perdagangan, maka jangan kasih izin eksportnya.

Izinnya ditangguhkan sementara?

Iya, izinnya bisa ditahan oleh Menteri Perdagangan hingga mereka mematuhi domestic market obligation dan *domestic price obligation* yang sudah ditetapkan. Jadi, itu tidak hanya menjadi semacam macan kertas, tapi juga terlaksana. ■ REN